



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS SOSIAL KAB. JOMBANG

Jalan Raden Wijaya No. 5 Jombang



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 telah selesai disusun sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indicator kinerja Dinas Sosial sebagai landasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial selama 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan renstra ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2025-2029, yang mengusung visi “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua” serta memperhatikan arah kebijakan Pembangunan nasional dan provinsi.

Dokumen ini disusun untuk menjawab tantangan strategis dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), serta mendorong penyelenggaraan layanan sosial yang inklusif, berkualitas, dan berbasis data. Renstra ini juga merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat, sesuai dengan prinsip *good governance* dan semangat reformasi birokrasi.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, termasuk perangkat daerah terkait, lembaga non pemerintah, dan mitra kerja lainnya. Masukan dan saran dari berbagai pihak senantiasa kami harapkan untuk penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan sosial ke depan.

Akhirnya kami berharap dokumen renstra ini dapat menjadi pedoman kerja yang strategis dan operasional bagi seluruh jajaran Dinas Sosial

Kabupaten Jombang dalam 5 (lima) tahun ke depan, demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Jombang yang lebih maju dan sejahtera.

Jombang, 19 September 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JOMBANG



AGUNG HARIADI, S.T, MM
NIP 19701126 200212 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1 Maksud.....	6
1.3.2 Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PERMASALAHAN DAN	
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	28
2.1.5 Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan.....	31
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	32
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan	
Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	34
2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian	
Lingkungan Hidup Strategis	38
2.2.4 Permasalahan	40
2.2.5 Isu Strategis.....	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029	46
3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	47
3.3. Strategis PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra	
PD Tahun 2025-2029.....	49
3.4. Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Renstra PD Tahun 2025-2029.....	50

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial	53
4.2 Subkegiatan Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	80
4.2.1 Program Pendukung Pengarusutamaan Gender	82
4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK) .	83
4.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	83
4.3.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	84
BAB V PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Kaidah Pelaksanaan	86
5.3 Pedoman Transisi	86
5.4 Pengendalian dan Evaluasi	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Dinas Sosial berdasarkan tingkat Pendidikan, Golongan ruang dan jabatan.....	18
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas sosial tahun 2020-2024	22
Tabel 2.3	Realisasi anggaran Dinas Sosial tahun 2020-2024.....	27
Tabel 2.4	Capaian evaluasi pelayanan publik tahun 2020-2024.....	28
Tabel 2.5	Data PPKS tahun 2020-2024	28
Tabel 2.6	Data PSKS tahun 2024	29
Tabel 2.7	Data terpadu kesejahteraan sosial tahun 2020-2024.....	30
Tabel 2.8	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional tahun 2025	30
Tabel 2.9	Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pelayanan Kessos	31
Tabel 2.10	Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	31
Tabel 2.11	Matrik kemitraan pelayanan sosial	31
Table 2.12	Pemetaan permasalahan untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.....	32
Tabel 2.13	Teknik menyimpulkan isu strategis Dinas Sosial	44
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra	47
Tabel 3.2	Keselarasan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial	48
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra	49
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	50
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Sosial.....	55
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	65
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	80
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029	83
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2029	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Konsep Renstra PD	7
Gambar 1.2 kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.....	8
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jombang.....	18
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan rencana strategis (renstra) Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 merupakan bagian dari siklus system perencanaan Pembangunan nasional dan daerah yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dalam konteks pelaksanaan Pembangunan daerah, Dinas Sosial Kabupaten Jombang memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. tantangan sosial yang terus berkembang, seperti kemiskinan, ketunaan sosial, disabilitas, dan masalah kesejahteraan sosial lainnya, menuntut adanya arah kebijakan dan strategi pelayanan sosial yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Renstra ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial selama lima (5) tahun ke depan, agar selaras dengan visi, misi Bupati Jombang terpilih, prioritas Pembangunan nasional dan daerah, serta tujuan pembangunan sosial yang berkeadilan dan inklusif.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun renstra Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Noor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823)
5. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomo 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
9. Undang-undang Nomor 23 tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856)
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
21. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru serta Kawasan Selingkar wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 225)
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
23. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
24. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender untuk Pemerintah Daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Caara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459)
29. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
30. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427)
31. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah
32. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
34. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 123)
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang tahun 2021-2041 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor/E)

37. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2045
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029
39. Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 87/D)
40. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat dengan Kondisi Tertentu di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 1/E)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, terukur, efektif, dan efisien guna mendukung pencapaian sasaran Pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Tujuan penyusunan renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan bidang sosial yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2025-2029
2. Menyediakan acuan dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahunan Dinas Sosial
3. Meningkatkan sinergi antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah dalam bidang kesejahteraan sosial
4. Memastikan terwujudnya pelayanan sosial yang merata, inklusif, dan responsive terhadap kebutuhan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
5. Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public di bidang sosial

Hubungan Antar Dokumen

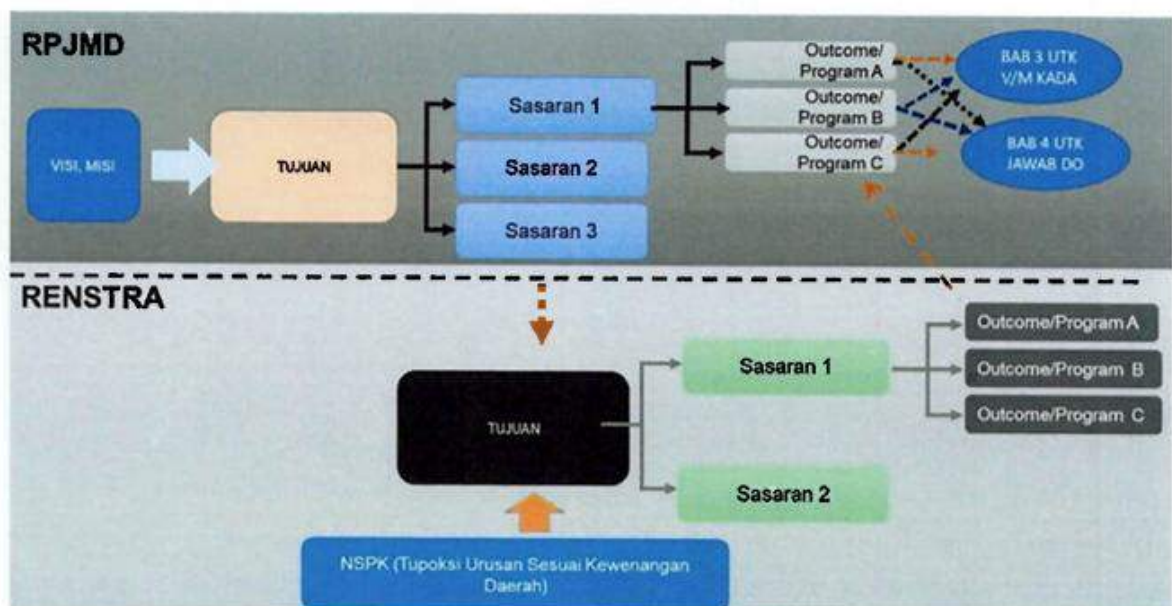
Sebagaimana Amanah undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa dokumen rencana Pembangunan daerah akan terkait dengan dokumen rencana Pembangunan daerah lain di daerah tersebut dan dengan dokumen rencana pemerintah di level atasnya maupun nasional. Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 juga menjelaskan hubungan dokumen RPJMD Kabupaten dengan dokumen perencanaan Pembangunan lainnya secara lebih terperinci, seperti dibawah ini

Gambar 1.1 Konsep Renstra PD



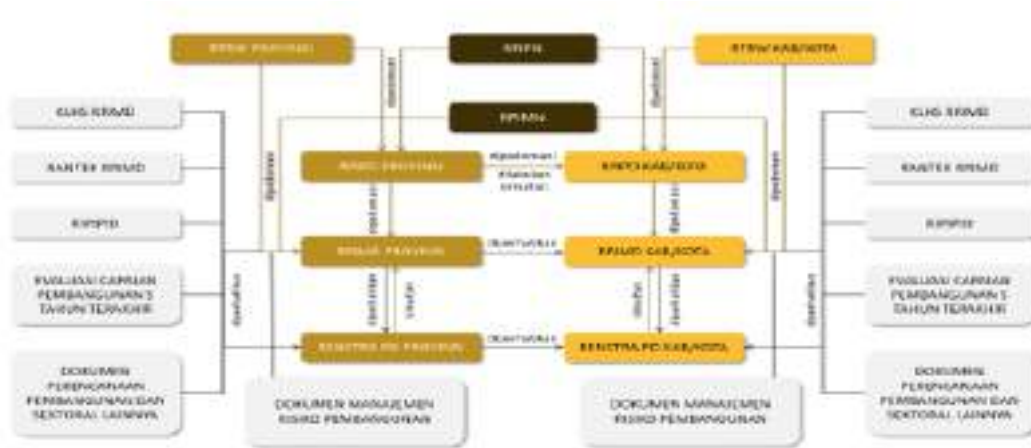
Sumber: Inmendagri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 1.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan renstra PD merupakan bagian penting dari proses perencanaan Pembangunan yang terintegrasi dan berbasis hasil. Inmendagri tersebut menegaskan bahwa tujuan dalam renstra PD harus disusun untuk mendukung secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran dalam dokumen RPJMD. Sasaran RPJMD, yang merupakan penjabaran dari tujuan Pembangunan daerah dalam jangka menengah, menjadi rujukan utama bagi perangkat daerah dalam merumuskan tujuan renstra. Dengan demikian, setiap langkah perangkat daerah wajib menyelaraskan arah kebijakan, program, dan kinerja organisasinya agar memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran RPJMD. Inmendagri ini juga menekankan pentingnya keselarasan indikator kinerja antara sasaran RPJMD dan tujuan renstra PD agar dapat dilakukan pengukuran yang konsisten dan terintegrasi dalam system evaluasi pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1) Merumuskan latar belakang penyusunan renstra PD tahun 2025-2029 berpa Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya renstra PD tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amant, regulasi dan nilai strategis renstra PD

- 2) Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan renstra PD tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum
- 3) Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra PD tahun 2025-2029
- 4) Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkasan tentang masing-masing bab dalam renstra PD tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 1) Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostic
- 2) Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK)
- 3) Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar dinarasikan Kesimpulan datanya (bukan menarasikan data)
- 4) Penyajian pada bab ini memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah
 - b. Sumber daya perangkat daerah
 - c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)
 - d. Kelompok sasaran layanan PDCatatat: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a) Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)
 - b) Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada)
 - c) Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada)
- 5) Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari bab II, Rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian Pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan
- 6) Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya
- 7) Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMD 2025-2029, renstra K/L, laporan resmi dari Lembaga pemerintah/Lembaga luar negeri, laporan KLHS RPJMD 2025-2029 ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD
- 8) Merumuskan isu strategis perangkat daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:
- a. Permasalahan
 - b. Isu strategis

- c. Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 1) Tujuan dan sasaran renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2025-2029
- 2) Sasaran renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2025-2029
- 3) Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029
- 4) Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 1) Uraian program
- 2) Uraian kegiatan
- 3) Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
- 4) Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah
- 5) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
- 6) Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasar urusan pemerintahan daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, terutama kelompok rentan dan marginal. Tugas utama Dinas Sosial meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pelayanan umum, serta fasilitasi dan pembinaan kepada masyarakat dan lembaga sosial. Fungsi ini dilaksanakan melalui pendekatan perlindungan, pemberdayaan, rehabilitasi, serta penanganan masalah sosial secara komprehensif dan berkelanjutan

Pelayanan Dinas Sosial menjangkau berbagai sasaran seperti fakir miskin, lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, korban kekerasan, korban bencana, dan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan pembinaan terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) seperti karang taruna, pekerja sosial Masyarakat (PSM), tagana, dan Lembaga kesejahteraan sosial (LKS)

Secara umum, keberadaan Dinas Sosial sangat strategis dalam menciptakan keadilan sosial, mempercepat penanganan kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan prinsip kerja yang humanis, resposif, dan inklusif, Dinas Sosial menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan dan perlindungan sosial di daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial Kabupaten Jombang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial

- e. penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial
- f. pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

selanjutnya tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Jombang diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

1. Kepala Dinas

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan, anggaran dan perundang-undangan
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik
- h. Pengelolaan asset
- i. Pengelolaan kearsipan

- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan system informasi
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusuna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) di lingkup Dinas
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar opeasional prosedur (SOP) serta standar pelayanan public (SPP)
- n. Melaksanakan koordinasi implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikasn oleh Kepala Dinas Sosial.

Adapun sekretaris membawahi :

2.1 Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset,
mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan;
- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga
- c. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, daftar urutan kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- e. Menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;

- f. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya;
 - g. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - h. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - i. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - j. Merencanakan kebutuhan barang dan jasa;
 - k. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian barang dan jasa;
 - l. Melaksanakan perawatan dan perbaikan barang-barang inventaris;
 - m. Melaksanakan pengelolaan dan pengamanan aset;
 - n. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang-barang inventaris;
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
- Bidang rehabilitasi sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza
 - b. Perumusan pedoman penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza
 - c. Bimbingan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza
 - d. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan pengemis serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza
 - e. Pengawasan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan pengemis serta pemerlu

pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial

4. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

Bidang pemberdayaan kelembagaan sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pemberdayaan kelembagaan sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala bidang pemberdayaan kelembagaan sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
- c. Penyusunan pedoman penyelenggaraan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
- d. Pemberian bimbingan teknis pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
- e. Pelaksanaan koordinasi teknis pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial

- f. Pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan, pengumpulan uang dan barang, undian gratis berhadiah, pengelolaan taman makam pahlawan, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.
- 5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

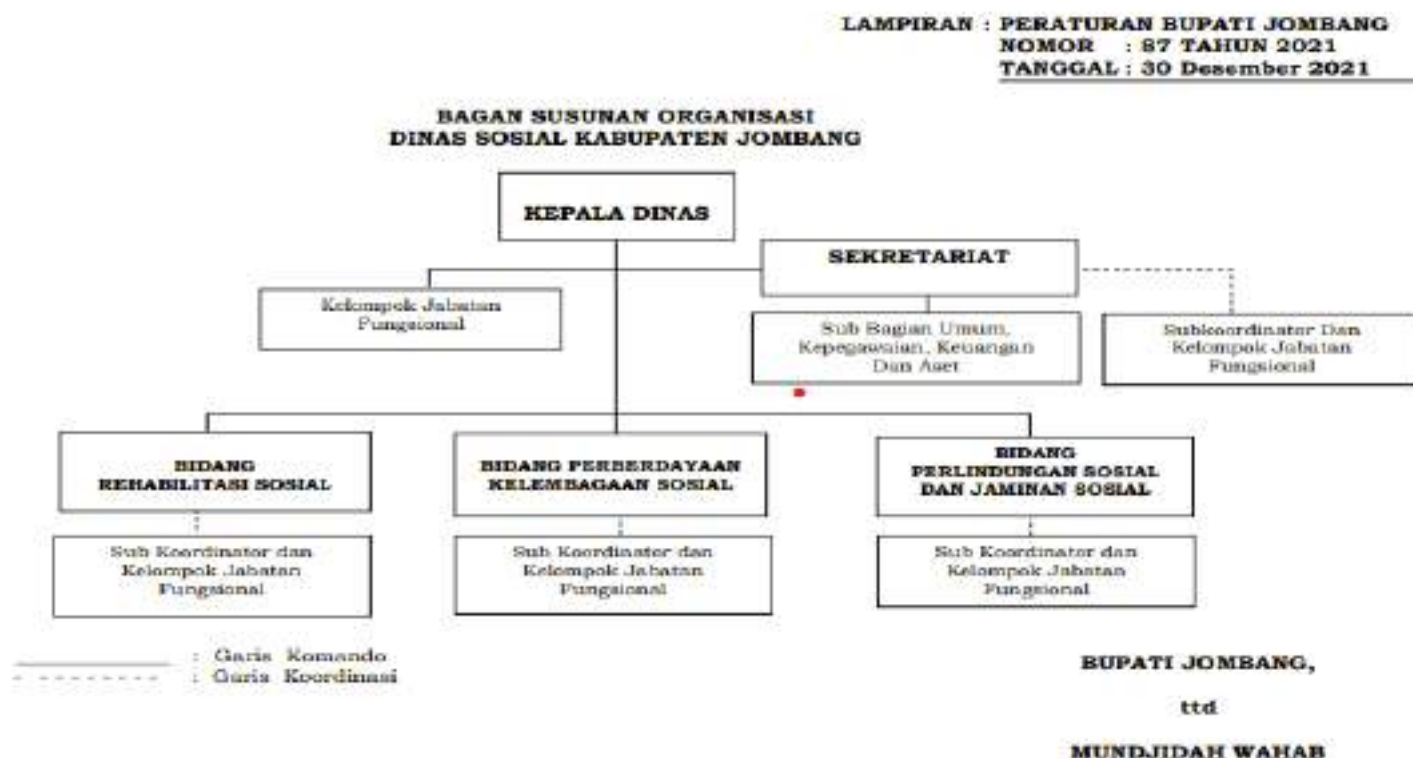
Bidang perlindungan dan jaminan sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian tugas Dinas Sosial dibidang perlindungan dan jaminan sosial. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi:

 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
 - c. Penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
 - d. Pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
 - e. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
 - f. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
 - g. Pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial :



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Pegawai

Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Jombang sebanyak 40 orang yang terdiri atas 17 orang Pegawai Negeri Sipil, 3 orang PPPK, dan 20 orang pegawai honorer.

Tabel 2.1

Komposisi pegawai berdasarkan Pendidikan, golongan dan jabatan

a. Komposisi pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pegawai	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	S2	S1/D4	D3	SLTA	SMP	SD	
PNS	6	8	1	2			17
PPPK		2				1	2
Non PNS		12	1	6	1		20
Jumlah	6	22	2	8	1	1	39

b. Komposisi pegawai Berdasarkan Golongan

IV	III	II	I	IX
6	8	3	1	2

c. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Esl II	Esl III	Esl IV	Jabatan Fungsional	Pelaksana	Jumlah
1	3	1	8	26	39

2. Sarana dan Prasarana

[illegible][illegible]

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota. Penerapan SPM bidang sosial menuntut adanya integrasi data PPKS terlantar, peran aktif SDM kesejahteraan sosial, serta alokasi anggaran yang memadai dalam dokumen perencanaan daerah. Dengan pemenuhan SPM pemerintah daerah diharapkan dapat menjamin perlindungan sosial secara merata dan berkeadilan. Adapun capaian penerapan SPM bidang sosial tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target lainnya	Target capaian pada tahun					Realisasi pada tahun					Capaian pada tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di luar panti	v			100	100	100	100	100	100	100	100	98,52	98,46	100	100	100	98,52	98,46
2	Rehabilitasi sosial anak terlantar di luar panti	v			100	100	100	100	100	100	100	100	98,33	100	100	100	100	98,33	100
3	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	v			100	100	100	100	100	100	100	100	100	98,46	100	100	100	100	98,46
4	Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	v			100	100	100	100	100	100	100	100	98,61	98,33	100	100	100	98,61	98,33
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	v			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase PMKS yang mandiri (PPKS yang keluar dari kepesertaan program)				3,36	3,41	3,46	3,51	n/a	3,19	3,11	3,95	3,59	n/a	94,94	91,2	114	102,3	n/a
7	Persentase capaian SPM bidang sosial				100	100	100	100	100	100	100	100	99,09	99,05	100	100	100	99,09	99,05
8	Nilai AKIP				71,00	72,20	74,4	80,7	81,9	71,43 (BB)	74,82 (BB)	80,62 (A)	81,88 (A)	78,35	100,6	103,6	108,36	101,5	95,67
9	Persentase asyarakat miskin dan rentan yang				n/a	n/a	n/a	n/a	35,5	n/a	n/a	n/a	n/a	51,10	n/a	n/a	n/a	n/a	143,94

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target lainnya	Target capaian pada tahun					Realisasi pada tahun					Capaian pada tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	terpenuhi kebutuhan dasarnya																		
10	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemandirian sosialnya				n/a	n/a	n/a	n/a	9,90	n/a	n/a	n/a	n/a	3,76	n/a	n/a	n/a	n/a	37,98
11	Persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial				n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100
12	Persentase pihak-pihak yang berperan dalam pelestarian dan penanaman nilai kepahlawanan dan keperintisan, nilai kesetiakawanan sosial serta restorasi sosial				n/a	n/a	n/a	n/a	30	n/a	n/a	n/a	n/a	80	n/a	n/a	n/a	n/a	266,67
13	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial				11,13	n/a	n/a	n/a	n/a	10,78	n/a	n/a	n/a	n/a	96,85	n/a	n/a	n/a	n/a
14	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial				72,57	n/a	n/a	n/a	n/a	69,85	n/a	n/a	n/a	n/a	96,25	n/a	n/a	n/a	n/a
15	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar				4,49	n/a	n/a	n/a	n/a	4,28	n/a	n/a	n/a	n/a	95,38	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target lainnya	Target capaian pada tahun					Realisasi pada tahun					Capaian pada tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
16	Persentase PSKS yang menyelenggarakan usaha kessos				7,3	n/a	n/a	n/a	n/a	7,3	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a
17	Persentase LKS yang menyediakan pelayanan kessos sesuai standar				44	n/a	n/a	n/a	n/a	44	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a
18	Permil PMKS yang diberi pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi PMKS				1,3	n/a	n/a	n/a	n/a	1,2	n/a	n/a	n/a	n/a	92,3	n/a	n/a	n/a	n/a
19	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial				n/a	68,4	73,90	79,4	n/a	n/a	62,5	68,6	80,89	n/a	n/a	91,3	92,8	101,9	n/a
20	Persentase desa/ kelurahan yang update DTKS				n/a	n/a	82,70	100	n/a	n/a	n/a	120,9	100	n/a	n/a	n/a	146,2	100	n/a
21	Persentase pengaduan data KPM atau DTKS yang tertangani				n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a	100	99,3	n/a	n/a	n/a	100	99,3	n/a
22	Persentase PSKS yang berdaya				n/a	10,20	7,8	8,9	n/a	n/a	10,2	9,1	8,9	n/a	n/a	100	117	100	n/a
23	Persentase disabilitas terrlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi				n/a	4,1	5,7	6,3	n/a	n/a	4,1	5,5	6,67	n/a	n/a	100	96,9	105,9	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target lainnya	Target capaian pada tahun					Realisasi pada tahun					Capaian pada tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
24	Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi				n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a	98,3	99,8	n/a	n/a	n/a	98,3	99,8	n/a
25	Persentase kejadian bencana yang tertangani				n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a
26	Persentase desa/keluraha siaga bencana				n/a		100	40,6	n/a	n/a		100	40,6	n/a	n/a		100	100	n/a
27	Persentase TMP yang sesuai standar				n/a	80	95	100	95	n/a	80	85	85	n/a	n/a	100	85	85	95
28	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur				n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a
29	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan perlindungan sosial				n/a	n/a	n/a	n/a	23,90	n/a	n/a	n/a	n/a	23,96	n/a	n/a	n/a	n/a	100
30	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan jaminan sosial				n/a	n/a	n/a	n/a	78,60	n/a	n/a	n/a	n/a	86,2	n/a	n/a	n/a	n/a	109,7
31	Persentase data terpadu kesejahteraan sosial yang valid				n/a	n/a	n/a	n/a	63,00	n/a	n/a	n/a	n/a	70,8	n/a	n/a	n/a	n/a	89,7
32	Persentase SDM kesos yang tersertifikasi				n/a	n/a	n/a	n/a	33,30	n/a	n/a	n/a	n/a	41,4	n/a	n/a	n/a	n/a	124
33	Persentase LKS yang terakreditasi				n/a	n/a	n/a	n/a	7,0	n/a	n/a	n/a	n/a	7,6	n/a	n/a	n/a	n/a	108
34	Persentase penyandang				n/a	n/a	n/a	n/a	4,30	n/a	n/a	n/a	n/a	6,16	n/a	n/a	n/a	n/a	143,3

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target lainnya	Target capaian pada tahun					Realisasi pada tahun					Capaian pada tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi																		
35	Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi				n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	111,45	n/a	n/a	n/a	n/a	111,5
36	Persentase korban benana yang tertangani				n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100
37	Persentase desa siaga bencana yang aktif				n/a	n/a	n/a	n/a	40,6	n/a	n/a	n/a	n/a	40,6	n/a	n/a	n/a	n/a	100
38	Persentase sarpras taman makam pahlawan (TMP) yang sesuai standar				n/a	n/a	n/a	n/a	85	n/a	n/a	n/a	n/a	85	n/a	n/a	n/a	n/a	100

Tabel 2.3
Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2020-2024

Program	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran tahun ke						Capaian realisasi anggaran pada tahun ke			
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program pelayanan administrasi perkantoran	974.034.025					919.668.828					94,42				
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.303.670.800					1.258.606.300					96,54				
Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD	23.259.700					22.032.000					94,72				
Program pembinaan lingkungan sosial bidang sosial	150.000.000					142.131.000					94,75				
Program rehabilitasi sosial	456.652.300					384.657.000					96,85				
Program perlindungan dan jaminan sosial	4.550.220.947					4.244.569.136					93,28				
Program pemberdayaan sosial	237.927.800					230.768.600					96,99				
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		4.551.995.005	4.303.139.879	4.497.270.789	5.782.650.016		3.609.377.718	3.535.627.617	3.827.813.297	5.575.193.772		79,3	82,2	85,1	79,12
Program pemberdayaan sosial		1.260.743.700	1.530.067.100	1.845.763.100	1.699.133.150		1.227.974.774	1.516.733.600	1.840.909.257	1.685.870.000		97,4	99,1	99,7	99,22
Program rehabilitasi sosial		2.020.620.600	1.527.483.500	1.371.595.800	1.717.458.700		1.668.197.450	1.485.220.100	1.351.539.700	1.654.013.268		82,6	97,2	98,5	96,31
Program perlindungan dan jaminan sosial		5.243.853.900	16.057.700.600	14.860.097.322	17.726.985.963		4.835.596.594	15.921.836.656	14.739.579.675	17.357.975.340		92,2	99,2	99,2	97,92
Program penanganan bencana		163.611.700	488.162.200	191.727.300	624.363.600		135.354.500	357.470.165	189.150.600	609.452.630		82,7	73,2	98,7	97,61
Program pengelolaan taman makam pahlawan		13.210.000	198.537.000	230.247.100	216.567.700		13.210.000	147.138.100	229.223.600	215.378.000		100	73,9	99,6	99,45

Secara umum, capaian realisasi anggaran Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun terakhir berada dalam kisaran 86%-96%, dengan tren positif setelah tahun 2021. Hal ini mencerminkan kemampuan manajerial dan perencanaan yang semakin matang dalam mendukung program pelayanan sosial yang efektif, efisien, dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Tabel 2.4
Capaian Evaluasi Pelayanan Publik Dinas Sosial Tahun 2022-2024

Jenis evaluasi pelayanan publik	2022	2023	2024
Indeks kualitas pelayanan public (IKPP)	6.944	8,52	8,92
Indeks kepuasan masyarakat (SKM)	80,29	85,87	87,95
Penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan public (ombudsman)	70,45	80,47	84,21
Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Public (PEKPPP) Menpan RB	-	4,25	4,60

Secara keseluruhan, capaian evaluasi pelayanan public Dinas Sosial menunjukkan tren peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, baik dari persepsi Masyarakat (SKM), penilaian Lembaga independent (ombudsman), maupun evaluasi teknokratik (IKPP dan PEKPPP). Hal ini menjadi bukti konkret Upaya reformasi birokrasi dan pengatan budaya kerja berdampak sudah mulai terlihat dalam praktik pelayanan sosial.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Sosial dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) mencakup berbagai lapisan Masyarakat tergolong sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Kelompok sasaran ini ditetapkan berdasarkan kondisi kerentanan sosial, kemiskinan, ketelantaran, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Berikut adalah kelompok sasaran utama layanan Dinas Sosial:

Tabel 2.5
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2024

No	Jenis PPKS	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak balita terlantar	7	5	13	14	3
2	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	11	49	50	51	20
3	Anak jalanan	12	12	12	12	54
4	Korban tindak kekerasan	0	0	0	0	0
5	Tuna Susila	3	4	4	4	0
6	Pengemis	18	26	27	27	100
7	Gelandangan	7	10	13	14	108
8	Pemulung	112	120	121	120	10

No	Jenis PPKS	2020	2021	2022	2023	2024
9	Kelompok minoritas	6	7	0	6	0
10	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	116	125	126	123	0
11	Korban penyalahgunaan NAPZA	8	11	11	14	2
12	Anak terlantar	79	9	87	92	36
13	Komunitas adat terpencil	0	0	0	0	0
14	Keluarga bermasalah sosial psikologis	55	68	76	76	0
15	Korban bencana alam	3.100	9.680	7.850	7.891	11686
16	Korban bencana sosial	0	0	380	0	0
17	Pekerja migran bermasalah sosial	2	3	3	3	0
18	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	3	3	4	4	0
19	Korban trafficking	1	1	1	1	1
20	Perempuan rawan sosial ekonomi	4.234	4.323	4.321	4.323	4323
21	Lanjut usia terlantar	1.821	2.225	2.212	2.243	2216
22	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	423	467	498	508	498
23	Penyandang disabilitas	4.241	4.506	4.629	4.625	4630
24	Fakir miskin	531.757	728.770	706.147	689.862	95325
25	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	11	10	11	11	58
26	Anak yang berhadapan dengan hukum	7	5	13	14	3
	Jumlah	546.038	750.455	726.608	710.036	119.100

Tabel 2.6 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tahun 2024

No	Jenis PSKS	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional	15
2	Pekerja Sosial Masyarakat	153
3	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	11
4	Penyuluh Sosial	15
5	Taruna Siaga Bencana	36
6	Karang taruna	82
7	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	91
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial	40
9	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial	0
10	Keluarga Pioneer	1
11	Dunia Usaha yang Melakukan UKS	4
12	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	21

Tabel 2.7
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bandarkedungmulyo	24548	31.883	32.471	30.501	30.662
2	Bareng	20689	32.218	3.720	30.343	30.060
3	Diwek	38044	51.465	51.164	48.481	48.348
4	Gudo	22859	31.862	32.070	9.931	29.870
5	Jogoroto	32561	41.510	41.481	39.967	40.038
6	Jombang	27827	37.839	38.941	7.066	37.054
7	Kabuh	22710	28.671	28.208	26.295	26.114
8	Kesamben	23369	30.656	31.065	9.318	29.319
9	Kudu	15737	21.011	20.964	9.064	19.023
10	Megaluh	15392	22.832	22.648	21.410	21.483
11	Mojoagung	32060	47.211	47.813	45.234	45.302
12	Mojowarno	46197	57.821	57.336	53.553	53.484
13	Ngoro	31925	49.357	9.386	47.149	47.309
14	Ngusikan	13142	17.763	7.651	16.660	16.538
15	Perak	22964	34.053	34.142	32.157	3.936
16	Peterongan	27702	35.339	5.233	33.906	33.865
17	Plandaan	17635	24.103	24.303	3.035	23.318
18	Ploso	19496	26.444	27.642	26.635	26.741
19	Sumobito	39371	55.275	55.282	51.478	51.033
20	Tembelang	21192	29.500	9.166	26.064	26.188
21	Wonosalam	16337	21.957	21.877	18.844	18.806
	Jumlah	531.757	728.770	732.563	687.091	686.491

Tabel 2.8
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN Kabupaten Jombang) Tahun 2025

NO	KECAMATAN	KELUARSA	ANGGOTA KELUARSA	DESK 1		DESK 2		DESK 3		DESK 4		DESK 5		DESK 6-10		BELUM PEMERIKHAAN		NONAKTIF	
				Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota
1	Perak	19.924	58.985	1.742	4.906	2.401	7.533	2.774	8.127	2.544	7.359	2.330	6.896	7.314	22.717	814	1.426	3	37
2	Gudo	20.884	58.228	1.264	3.358	2.324	6.894	2.688	7.531	2.785	7.432	2.476	6.845	8.506	25.111	833	1.252	8	37
3	Ngoro	28.949	80.493	2.244	6.388	3.744	11.549	3.923	11.442	3.688	10.295	3.367	8.864	10.198	30.336	1.082	1.521	6	43
4	Bareng	21.803	59.082	2.080	5.531	2.875	8.125	2.908	8.223	2.688	7.395	2.581	7.826	7.444	21.754	716	1.079	13	45
5	Wonosalam	12.589	35.241	2.136	5.724	1.974	5.803	1.655	4.589	1.580	4.587	1.438	3.915	3.415	9.982	417	587	4	14
6	Mojoagung	28.948	84.219	2.159	6.157	3.598	10.987	3.917	11.508	3.635	10.407	3.296	9.165	11.102	34.676	1.214	1.675	2	37
7	Mojowarno	34.287	99.543	2.586	7.258	4.273	13.181	4.891	13.798	4.487	12.843	3.910	10.979	13.056	39.767	1.268	1.886	6	61
8	Drek	39.884	115.585	1.834	5.570	3.398	11.211	4.717	13.756	4.858	13.895	4.816	13.547	17.616	55.616	1.581	2.459	4	57
9	Jombang	48.952	140.941	1.779	4.934	2.908	8.368	3.078	10.098	4.485	12.302	5.046	13.851	28.223	86.036	2.937	5.297	4	45
10	Peterongan	24.309	70.081	1.800	4.938	2.808	8.848	3.123	8.882	2.785	7.989	2.780	7.844	10.181	30.544	1.011	1.683	3	34
11	Sumobito	31.503	89.837	2.590	6.708	3.846	11.655	4.391	12.542	4.267	11.998	3.829	10.989	11.413	34.253	1.127	1.643	6	46
12	Kesamben	24.916	69.256	1.614	3.876	2.388	6.896	2.878	7.811	3.087	8.238	2.808	7.190	11.467	33.835	859	1.267	6	34
13	Tembelang	20.707	58.359	1.455	3.995	2.208	6.232	2.425	6.822	2.633	6.175	2.219	6.162	9.193	26.798	808	857	3	25
14	Ploso	15.795	43.038	1.517	3.826	2.815	5.777	2.202	6.053	2.195	5.456	1.731	4.704	5.680	16.592	467	701	4	37
15	Plandaan	14.794	36.840	1.896	4.701	2.432	6.801	2.218	5.989	1.912	4.621	1.495	3.845	4.405	12.555	358	478	5	48
16	Kabuh	16.283	43.350	1.803	4.483	2.501	6.868	2.536	6.879	2.267	5.994	1.829	4.816	4.918	13.847	428	581	3	31
17	Kudu	12.122	32.755	1.238	2.871	1.705	4.957	1.798	4.977	1.729	4.475	1.258	3.426	3.990	11.550	348	478	2	25
18	Bandarkedungmulyo	18.348	52.748	1.390	4.848	2.568	7.874	3.185	9.080	2.648	7.559	2.240	6.148	5.811	16.852	701	1.039	5	38
19	Jogoroto	24.888	75.115	1.713	4.908	2.758	8.998	3.028	11.338	3.174	9.480	3.035	9.862	9.565	30.531	791	1.180	2	38
20	Megaluh	15.996	41.032	1.145	2.824	1.988	4.755	1.854	5.055	1.790	4.648	1.650	4.502	6.561	18.846	408	588	8	35
21	Ngusikan	8.686	23.950	1.094	2.890	1.430	4.078	1.430	2.987	1.080	2.845	882	2.404	2.823	7.729	199	284	1	18
	Total	480.871	1.368.897	37.218	98.189	65.688	166.225	62.749	177.821	68.185	196.471	64.418	181.713	182.485	578.514	18.128	27.896	98	788

Tabel 2.9
sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial

No	Sarana dan prasarana pelayanan sosial	Jumlah
1	Pusat usaha kesejahteraan sosial (Puskesos)	285
2	Pusat rehabilitasi sosial	-
3	Pusat pendidikan dan pelatihan	-
4	Balai/panti sosial	-
5	Rumah singgah	1
6	Rumah perlindungan sosial	-

Tabel 2.10 Sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah
1	Gudang bencana	1
2	Mobil rescue	1
3	Mobil dumlap	1
4	Truk rescue	1
5	Sepeda motor trail	1
6	Pelampung	10
7	Tenda keluarga	4
8	Tenda serbaguna	1
9	Tenda pleton	1
10	Kampung siaga bencana	1
11	Perlengkapan DU	1

2.1.5 Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Sosial dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial mencakup berbagai pihak, baik unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.11
Matrik Kemitraan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang

Jenis Layanan	Mitra Utama	Peran Kemitraan
Rehabilitasi sosial	- LKS - TKSK, PSM, Karang Taruna - Balai Rehabilitasi Kemensos	- Pelayanan langsung - Rujukan kasus, - Pemulihan sosial
Perlindungan sosial saat bencana	- BPBD - Tagana - Dinkes, RSUD - TNI/Polri	- Tanggap darurat - Dapur umum - Layanan evakuasi pengungsi
Bantuan sosial tunai/ non tunai	- BPKAD - Bank penyalur, kantor pos	- Penyaluran bansos - Validasi data penerima

Jenis Layanan	Mitra Utama	Peran Kemitraan
	- Desa/kelurahan	- Pendampingan masyarakat
Pemberdayaan ekonomi dan kemandirian PPKS	- Dunia usaha (CSR) - Lembaga pelatihan kerja	- Pelatihan ketrampilan - Pemberian modal usaha
Verifikasi dan validasi DTKS	- Pemerintah desa - Dispendukcapil - TKSK - Kecamatan	- Pendataan ulang - Input sistem - Penyesuaian data kependudukan
Pelestarian nilai sosial dan kepahlawanan	- Organisasi keagamaan/ sosial - Dinas Pendidikan - LVRI - Bangkesbangpol	- Sosialisasi - Kegiatan edukasi
Penanganan korban kekerasan dan perdagangan orang	- Dinas P3AKB - Polres - Lembaga perlindungan anak/ Perempuan - Rumah pelayanan sosial	- Konseling - Layanan rujukan - Penanganan hukum
Monitoring dan evaluasi pelayanan sosial	- Inspektorat, bappeda, bagian organisasi setda - Ombudsman - Menpan RB (PEKPPP)	- Penilaian kinerja - Standar pelayanan - Evaluasi akuntabilitas

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang yang berfluktuatif dan cenderung meningkat menunjukkan kondisi masyarakat yang rentan untuk masuk di bawah garis kemiskinan. Karenanya, perlindungan dalam bentuk jaminan sosial bagi masyarakat, khususnya PPKS menjadi penting agar mereka tidak masuk ke bawah garis kemiskinan. Berikut adalah permasalahan pelayanan Dinas Sosial:

Tabel 2.12 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas data sosial belum valid	Program tidak tepat sasaran	- Validasi DTKS tidak rutin (exclusion error dan inclusion error) - Akses data masyarakat terbatas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Rendahnya kemandirian sosial masyarakat miskin dan rentan	Banyak keluarga miskin tergantung pada bantuan	- Minim pelatihan ketrampilan - Terbatasnya akses permodalan dan pendampingan
3	Masih adanya PPKS yang belum terlayani secara optimal	Layanan rehabilitasi sosial belum menjangkau semua sasaran	- Keterbatasan SDM - Basis data belum lengkap
4	Partisipasi PSKS, masyarakat dan dunia usaha belum maksimal	Peran lembaga sosial masyarakat masih pasif	- Kurangnya pembinaan dan fasilitasi
5	Masih rendahnya akses Pendidikan bagi anak dari keluarga miskin	Banyak anak miskin, terlantar, dan PPKS tidak mengenyam Pendidikan layak atau putus sekolah	Focus Pendidikan formal belum menjangkau kelompok khusus (PPKS)
6	Lemahnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Minimnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	- Kurangnya edukasi dan simulasi kebencanaan - Rendahnya kesadaran risiko bencana di lingkungan sekitar

Berikut adalah matrik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) terhadap pelayanan Dinas Sosial:

STRENGTHS - Adanya regulasi nasional sebagai dasar pelayanan (SPM, DTKS, SIKS-NG) - Dukungan kebijakan daerah melalui RPJMD dan Renstra PD - Ketersediaan SDM relawan sosial seperti TKSK, PSM, tagana - Capaian SPM sosial mendekati 100% secara konsisten	WEAKNESS - Terbatasnya anggaran dibandingkan luasnya sasaran layanan - Keterbatasan SDM ASN dan fasilitas pendukung layanan lapangan - Kualitas dan pembaruan PPKS/DTKS belum sepenuhnya optimal - Evaluasi mutu layanan belum merata di seluruh unit kerja
OPPORTUNITIES - Dukungan teknologi informasi dan sistem digitalisasi layanan (SIKS-NG, e-SAKIP, e-SPM)	THREATS - Fluktuasi kondisi sosial akibat krisis ekonomi atau bencana alam

- Kemitraan dengan LKS, dunia usaha (CSR) - Peningkatan perhatian pemerintah pusat terhadap pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial	- Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial jangka Panjang - Tantangan geografis dalam mejangkau wilayah terpencil - Belum stabilnya sinergi antar OPD dan antar-level pemerintahan
---	---

2.2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk menjawab tantangan dan isu strategis pembangunan nasional ditetapkan visi pembanunan nasional sekaligus visi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029 adala “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Sementara itu 8 atau asta cita (misi) Pembangunan nasional adalah:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- 2) Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syraiah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- 3) Smelanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim insudtri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
- 4) Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran Perempuan, pemda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- 6) Membangun dari desa dandarid bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi seta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan

- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yakni “**Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045**”. Visi ini dicapai melalui misi Pembangunan RPJMD Propinsi Jawa Timur 2025-2029 yang disebut **Nawa Bhakti Satya** dan sekaligus menjadi program prioritas Jawa Timur, yaitu:

1. Jatim Sejahtera

Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sectoral-spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum Perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan diantaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu

2. Jatim kerja

Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (startup) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi, serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan ketrampilan abad 21 yang berdaya saing

3. Jatim akses

Memperkuat konektivitas antar wilayah dan antar aglomerasi dengan meningkatkan Pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu dan berkeadilan

4. Jatim cerdas

Memperkuat sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua

5. Jatim sehat

Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pelayanan Kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas. Merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergi dengan perwujudan universal health coverage (UHC)

6. Jatim berkah Amanah

Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial Masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa pancasila

7. Jatim agro

Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional

8. Jatim harmoni

Menjaga terwujudnya Masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga

9. Jatim Lestari

Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral

2.2.2.1 Visi Pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025-2029

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 adalah **“Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua”**. Visi ini menggambarkan tekad pemerintah Kabupaten Jombang untuk mewujudkan Pembangunan yang merata, adil, dan berkelanjutan di segala sektor, termasuk sektor kesejahteraan sosial. Penjelasan visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam dua pokok visi berikut:

- 1) “Maju” mengandung makna kondisi terwujudnya sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Jombang yang cerdas, berdaya saing, berbudaya, religious, sehat jasmani dan Rohani, sehingga mampu terlibat aktif dalam proses Pembangunan serta transformasi sosial yang inklusif, harmonis dan berkelanjutan
- 2) “Sejahtera”, bermakna kondisi Kabupaten Jombang di tahun 2029 yang terpenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, ditandai dengan kemandiria ekonomi daerah dan Masyarakat, ketahanan sosial, peningkatan kualitas

kehidupan yang ditopang dengan tata Kelola pemerintahan transformative yang bersih dan melayani, efektif dan efisien, serta transparan

2.2.2.2 Misi Pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 harus mendukung tercapainya visi “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua”. Dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan maka misi Pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius dan berdaya saing global

Misi ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Jombang yang mampu mendukung proses transformasi sosial yang inklusif, adaptif, dan inovatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. focus dari penyelenggaraan misi adalah pada pembangunan kualitas sumberdaya manusia, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun sosial lainnya termasuk di dalamnya penurunan kemiskinan dan perlindungan masyarakat dari bencana.

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah secara berkesinambungan

Misi ini diselenggarakan melalui diversifikasi ekonomi dan hilirisasi

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan
4. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan local
5. Menghadirkan transformasi tata Kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif

Dalam mensinkronkan antara visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dinas Sosial Kabupaten Jombang mengembangk amanah untuk mewujudkan misi kesatu, yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius dan berdaya saing global. Misi ini memiliki keterkaitan erat dengan peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas hidup kelompok miskin dan rentan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial serta penguatan kapasitas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Dinas Sosial turut

berperan dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing dengan memberikan intervensi sosial yang terarah, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
Telaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang disusun untuk mendukung penyusunan renstra Dinas Sosial kabupaten Jombang tahun 2025-2029, sesuai dengan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017, adalah sebagai berikut:

9) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jombang memuat kebijakan pemanfaatan ruang dan arahan Pembangunan wilayah yang menjadiahkan dalam penyusunan kebijakan sektoral, termasuk kebijakan di bidang kesejahteraan sosial. Berdasarkan RTRW Kabupaten Jombang arah Pembangunan wilayah meliputi pengembangan Kawasan permukiman, Kawasan agropilitan, Kawasan industry, sert penguatan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar

10) Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan KLHS merupakan Upaya memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) dalam perencanaan Pembangunan. Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangannya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
10. Mengurangi kesenjangan intra-dan antarnegara
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten Jombang menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan rencana Pembangunan memperhatikan keberlanjutan hidup dan kualitas hidup Masyarakat. KLHS mendorong prinsip inklusi sosial, ketahanan terhadap perubahan iklim, serta pengurangan risiko bencana, yang selaras dengan mandat Dinas Sosial.

Isu-isu strategis KLHS yang relevan dengan urusan sosial antara lain:

- a. Kerentanan sosial akibat degradasi lingkungan dan bencana alam, yang berdampak pada kelompok miskin, penyandang disabilitas, lansia, anak. Hal ini menuntut penguatan system perlindungan sosial berbasis risiko
- b. Kesenjangan akses terhadap pelayanan sosial di wilayah rentan ekologis, seperti daerah rawan banjir atau kekeringan, yang memperbesar ketimpangan sosial-ekonomi
- c. Dampak perubahan iklim terhadap ketahanan sosial masyarakat
Dimana Dinas Sosial perlu merespon dengan program adaptasi berbasis komunitas dan dukungan psikososial pasca bencana

2.2.4 Permasalahan

Permasalahan Adalah kondisi kesenjangan atau hambatan yang dihadapi perangkat daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan daerah. Permasalahan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis, serta kebutuhan Masyarakat yang belum terpenuhi. Permasalahan urusan sosial yakni Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang yang berfluktuatif dan cenderung meningkat menunjukkan kondisi Masyarakat yang rentan untuk masuk di bawah garis kemiskinan. Karenanya, perlindungan dalam bentuk jaminan sosial bagi Masyarakat, khususnya bagi PPKS menjadi penting agar mereka tidak masuk ke bawah garis kemiskinan.

2.2.5 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan, tantangan, atau peluang utama yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah maupun perangkat daerah. Isu strategis ditetapkan melalui proses analisis kondisi internal dan eksternal serta mempertimbangkan dinamika local, nasional, hingga global yang relevan dengan urusan pemerintah daerah.

Isu-isu strategis inilah yang menjadi dasar perumusan tujuan, sasaran dan strategi dalam renstra, sehingga perencanaan Pembangunan benar-benar menjawab tantangan nyata di lapangan. Matrik isu strategis Dinas Sosial sebagai berikut:

Tabel 2.13
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial

Potensi daerah yang permasalahan menjadi kewenangan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD				Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional	Kabupaten	
Masih tingginya jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang belum mendapatkan layanan secara optimal	1. Kerentanan sosial akibat degradasi lingkungan dan bencana alam, yang berdampak pada kelompok miskin, penyandang disabilitas, lansia, anak. Hal ini menuntut penguatan system perlindungan sosial berbasis risiko 2. Kesenjangan akses terhadap pelayanan sosial di wilayah rentan ekologis, seperti daerah rawan banjir atau kekeringan, yang memperbesar ketimpangan sosial-ekonomi 3. Dampak perubahan iklim terhadap ketahanan sosial Masyarakat Dimana Dinas Sosial perlu merespon dengan program adaptasi	1. Isu sustainable development goals 2. Perubahan iklim dunia dan kebutuhan mengatasinya 3. Isu globalisasi ekonomi 4. Disrupsi teknologi dan komunikasi (TIK) 5. Isu geopolitik dan geoekonomi 6. Demografi global dengan porsi penduduk lanjut usia meningkat	1. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di Tengah persaingan global yang semakin meningkat 2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia 3. Pergeseran struktur kelas masyarakat Dimana jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah 4. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif 5. Krisis lingkungan, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan mengancam masa depan bumi dan manusia	1. Pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah 2. Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja, perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup, 3. Pengembangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, Kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas 4. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik 5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip	1. Percepatan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang religius, unggul dan berdaya saing yang bertumpu pada keluarga berkualitas 2. Penguatan pondasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan perluasan investasi yang berdampak pada penurunan pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan yang bertumpu pada optimalisasi sektor utama (perdagangan dan industry) didukung sektor pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan usaha mikro 3. Optimalisasi sektor pertanian	1. Peningkatan jangkauan dan efektivitas layanan sosial terhadap PPKS 2. Peningkatan sistem intervensi sosial yang komprehensif dan terintegrasi lintas sektor yang berdampak pada penanganan permasalahan sosial secara terpadu dan berkelanjutan 3. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial 4. Peningkatan kualitas data PPKS dan data sosial untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat 5. Rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam

Potensi daerah yang permasalahan menjadi kewenangan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD				Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional	Kabupaten	
	berbasis komunitas dan dukungan psikososial pasca bencana		6. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global, salah satunya adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas. 7. Tata Kelola dan akuntabilitas pemerintahan yang diwarnai praktik korupsi membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan.	Pembangunan berkelanjutan 6. Kedaulatan pangan dan peninglatan kesejahteraan petani	melalui implementasi agro-minapolitan, hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah (value added) bagi petani dan mendukung ketahanan pangan daerah 4. Percepatan penyediaan infrastruktur dasar iklusf pendoorng konektivitas pengembangan wilayah dan penyediaan utilitas sarana dan prasarana perkotaan yang cerdsa (smart city) bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali 5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup penerapan kebijakan ekonomi hijau, konservatif	menghadapi bencana

Potensi daerah yang permasalahan menjadi kewenangan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD				Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional	Kabupaten	
					keanekaragaman hayati sesuai kewenangan daerah dan penguatan resiliensi masyarakat terhadap bencana 6. Peningkatan kesejahteraan sosial melalui intervensi yang tepat terhadap PPKS (pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial) yang difokuskan pada penduduk misin melalui pendekatan terintegrasi dengan melibatkan multi stakeholder 7. Mewujudkan kerukunan dan kesetaraan dalam masyarakat berbasis nilai-nilai budaya serta agama guna mewujudkan ketentraman	

Potensi daerah yang permasalahan menjadi kewenangan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD				Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional	Kabupaten	
					dan ketertiban umum 8. Penguatan tata Kelola pemerintahan yang daptif, kapasitas aparatur yang lincah (agile) dan inovasi pelayanan public yang berbasis information communication and technology (ICT)	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra PD tahun 2025-2029

Berdasarkan pokok-pokok visi yang ingin dicapai serta lima misi yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam Pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan lima tahun ke depan dirumuskan sebagai berikut:

TUJUAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD
Tujuan 1: Terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kesejahteraan sosial yang merata	Indeks kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1) Tingkat kemiskinan 2) Indeks ketahanan daerah
TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA
Meningkatnya kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	1) Meningkatkan akses terhadap layanan sosial	1. Indeks pemenuhan kebutuhan dasar 2. Indeks peranan sosial 3. Persentase capaian SPM bidang sosial
		2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah

Dinas Sosial sebagai penyelenggara urusan bidang sosial mempunyai tugas untuk mewujudkan misi pertama Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yakni “mewujudkan transformasi sosial yang berkesinambungan” dengan tujuan” Terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kesejahteraan sosial yang merata” dan sasaran “Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang sehat, produktif, dan berdaya saing” sehingga **tujuan Dinas Sosial adalah Meningkatkan**

kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial” dengan sasaran “Meningkatnya akses terhadap layanan sosial”

3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam dokumen rencana strategis (renstra), tujuan dan sasaran merupakan dua komponen perencanaan yang saling terkait dan membentuk kerangka logis Pembangunan jangka menengah. **Tujuan** merupakan pernyataan umum mengenai arah capaian strategis organisasi perangkat daerah yang ingin diwujudkan selama periode lima (5) tahun, dan menjadi kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan Pembangunan daerah. Tujuan dalam renstra bersifat normatif dan mencerminkan mandat kelembagaan perangkat daerah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

Sementara itu, **sasaran** adalah penjabaran operasional dari tujuan yang bersifat lebih spesifik, terukur, dan berjangka menengah. Sasaran menjelaskan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan, serta menjadi dasar penyusunan program, kegiatan, dan pengalokasian sumber daya. Dalam konteks renstra Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2025-2029, tujuan yang ingin dicapai adalah “meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial”, dengan indikator persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, dirumuskan **sasaran strategis**, yakni

- a) Meningkatkan akses terhadap layanan sosial, dengan indikator: 1) indeks pemenuhan kebutuhan dasar 2) indeks peranan sosial, 3) persentase capaian SPM bidang sosial
- b) Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD, dengan indikator nilai reformasi birokrasi perangkat daerah

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahunan						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial		Persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	1,2	1,32	1,59	1,68	1,8	1,92	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahunan						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya akses terhadap layanan sosial	Indeks pemenuhan kebutuhan dasar	60,82	60,83	60,84	60,85	60,86	60,87	
			Indeks peranan sosial	76,31	76,32	76,33	76,34	76,35	76,36	
			Persentase capaian SPM bidang sosial	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	75,65	75,70	75,75	75,80	75,85	75,90	

Tabel 3.2 Keselarasan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jombang

Kementerian Sosial	Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Jombang	Dinas Sosial Kabupaten Jombang
Tujuan 1: Meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan	Tujuan: Meningkatnya pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Masyarakat miskin dan rentan yang inklusif	Tujuan 1: Terciptanya SDM yang berkualitas dan kesejahteraan sosial yang merata	Tujuan 1: Meningkatnya kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
Sasaran: System kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang inklusif : 1. Indeks kesejahteraan sosial (IKESOS) 2. Indeks kesejahteraan sosial (IKESOS) lansia 3. Indeks kesejahteraan sosial (IKESOS) disabilitas	Sasaran: 1. Meningkatkan fungsi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial 2. Meningkatkan kepedulian Masyarakat terhadap permasalahan sosial	Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Sasaran: Meningkatnya akses terhadap layanan sosial
Tujuan 2: Tata Kelola Kementerian Sosial yang agile, berkualitas dan efisien	Tujuan Menciptakan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan public inovatif	Tujuan 5: Terwujudnya tata Kelola pemeritahan yang efektif dan efisien berbasis digital	Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD
Sasaran: Tata Kelola kesejahteraan sosial yang berdampak Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran: Tata Kelola kesejahteraan sosial yang berdampak Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran 12: Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan dengan ASN yang profesional	Sasaran: Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif, berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran renstra Dinas Sosial. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Sosial

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan fondasi dan konsolidasi data	Perluasan jangkauan dan penguatan kelembagaan	Pemberdayaan dan penguatan kapasitas sosial	Pengembangan inovasi pelayanan sosial	Konsolidasi hasil dan keberlanjutan
Penguatan fondasi dan konsolidasi data dilakukan agar tersedia data akurat dan dasar penyelenggaraan sosial terbentuk, melalui pendataan DTSEN	Perluasan jangkauan layanan dasar di wilayah rentan, dilakukan melalui perluasan layanan sosial di luar panti (home visit), penguatan kemitraan dengan LKS/CSR, serta peningkatan dukungan kelembagaan dan regulasi,	Pemberdayaan ekonomi PPKS, peningkatan kompetensi pekerja sosial, diharapkan mampu untuk Meningkatkan kapasitas individu dan komunitas dalam mewujudkan kesejahteraan sosial	Digitaliasi layanan sosial diperlukan untuk memperluas akses layanan sosial dan meningkatkan efisiensi intervensi terhadap PPKS	System pelayanan sosial terstandar dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial menyeluruh, dengan penguatan regulasi layanan sosial berbasis system terpadu

3.4 Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	1. Pemanfaatan data PPKS dan DTKS terintegrasi dengan system layanan digital sesuai pedoman Kemensos (Permensos No. 5/2019) 2. Mengacu pada NSPK pelatihan SDM kesejahteraan sosial dan PSKS (permensos No. 9/2018) 3. Mengintegrasikan SPM bidang sosial (pemendagri No. 59/2021) dalam penanganan kemiskinan ekstrem 4. Kolaborasi Dinas Sosial dengan mitra/ stakeholder untuk pemberdayaan sosial ekonomi Masyarakat miskin (sesuai pedoman program pemberdayaan sosial keluarga- permensos No. 1/2018) 5. Menjadikan sekolah rakyat sebagai bentuk layanan rehabilitasi sosial anak (mengacu pada NSPK rehabilitasi anak - Permensos no. 30/2017) 6. Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi	Integrasi program lintas sectoral untuk mempercepat perluasan akses layanan kesehatan secara bertahap difokuskan di wilayah kecamatan tertinggal (titik kemiskinan)	- Penguatan layanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial yang inklusif - Pelibatan dan penguatan masyarakat, lembaga sosial, dunia usaha dan relawan sosial - Penguatan regulasi, standar pelayanan minimal, serta sistem informasi kesejahteraan sosial	
		Peningkatan penanganan bencana berbasis masyarakat melalui peningkatan resiliensi terhadap bencana	- Peningkatan layanan kedaruratan sosial secara cepat, adaptif dan terkoordinasi - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana (kampung siaga bencana)	
		Percepatan satu data Indonesia di wilayah kabupaten secara bertahap	- Pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial yang terhubung dengan dengan portal satu data kabupaten Jombang - Sinkronisasi dan pemutakhiran rutin data sosial melalui verifikasi dan validasi lapangan - Penguatan koordinasi dengan opd terkait dan desa/kelurahan dalam integrasi data sosial	
		Transformasi tata Kelola pemerintahan yang lincah (agile) dan pelayanan public menuju daya saing daerah yang kompetitif	- Birokrasi yang agile - Digitalisasi layanan - Peningkatan kualitas SDM - Inovasi layanan publik	

Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi: Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua							
Misi: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berbudi Pekerti yang Luhur, Religius, dan Berdaya Saing Global							
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Arah Kebijakan PD
Terciptanya SDM yang berkualitas dan tingkat kesejahteraan sosial yang merata	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Mengoptimalkan penyelenggaraan layanan penyediaan jaminan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi PPKS di wilayah kecamatan dengan kategori terbelakang	Integrasi program lintas sectoral untuk mempercepat perluasan akses layanan kesehatan secara bertahap difokuskan di wilayah kecamatan tertinggal (titik kemiskinan)	Meningkatnya kesejahteraan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Meningkatnya akses terhadap layanan sosial	- Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan - Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) - Penguatan tata Kelola dan kelembagaan kesejahteraan sosial	- Penguatan layanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial yang inklusif - Pelibatan dan penguatan masyarakat, lembaga sosial, dunia usaha dan relawan sosial - Penguatan regulasi, standar pelayanan minimal, serta sistem informasi kesejahteraan sosial

Visi: Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua							
Misi: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berbudhi Pekerti yang Luhur, Religius, dan Berdaya Saing Global							
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Arah Kebijakan PD
		Mengoptimalkan perlindungan pada masyarakat melalui Upaya mitigasi dan penanganan dampak berbagai bentuk bencana daerah di kecamatan rawan bencana	Peningkatan penanganan bencana berbasis masyarakat melalui peningkatan resiliensi terhadap bencana			- Penguatan sistem perlindungan sosial dalam situasi bencana (pra, saat dan pasca bencana) - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi dan tanggap darurat bencana	- Peningkatan layanan kedaruratan sosial secara cepat, adaptif dan terkoordinasi - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana (kampung siaga bencana)
		Manajemen data penduduk dan kemiskinan yang akurat/valid berbasis desa	Percepatan satu data Indonesia di wilayah kabupaten secara bertahap			- Penguatan tata Kelola data kesejahteraan sosial yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi - Kolaborasi lintas sectoral dalam penyediaan dan pemanfaatan data sosial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	- Pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial yang terhubung dengan dengan portal satu data kabupaten Jombang - Sinkronisasi dan pemutakhiran rutin data sosial melalui verifikasi dan validasi lapangan - Penguatan koordinasi dengan opd terkait dan desa/kelurahan dalam integrasi data sosial

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial

Penyelenggaraan bidang urusan sosial merupakan bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Dalam pelaksanaannya, bidang ini dijabarkan ke dalam struktur program, kegiatan, sub kegiatan yang disusun secara sistematis dan terpadu. **Program** adalah Kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam rangka mendukung prioritas Pembangunan daerah dan nasional. Program bersifat strategis dan mencerminkan arah kebijakan daerah/negara. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang terdiri atas sejumlah tindakan atau upaya untuk menghasilkan keluaran tertentu (output) yang terukur secara langsung. Kegiatan dilakukan untuk memenuhi sasaran program. Sub kegiatan adalah rincian lebih lanjut dari kegiatan yang lebih spesifik, operasional, dan langsung berkaitan dengan pelayanan kepada Masyarakat atau pendukung pelaksanaan kegiatan. **Sub kegiatan** inilah yang dianggarkan dan dilaksanakan secara teknis oleh perangkat daerah.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Bagian ini menyajikan tentang kerangka pendanaan Pembangunan yang akan dilanjutkan dengan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun periode renstra. Mendasar pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Sosial Kabupaten Jombang melakukan penyesuaian sub kegiatan beserta indikatornya. Berikut ini rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan renstra periode 2025-2029.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatnya akses terhadap layanan sosial	Meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan sosial potensi sumber kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial		Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam pemberdayaan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	
				Meningkatnya partisipasi masyarakat, dunia usaha dan organisasi sosial dalam pengumpulan dana untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan	Jumlah kegiatan penggalangan sumbangan yang dilakukan di berbagai wilayah dalam kabupaten/kota	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Meningkatnya kapasitas sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah	Jumlah sumber kesejahteraan sosial yang mengalami peningkatan kapasitas serta aktif dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya warakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda duda perintis kemerdekaan yang Mendapatkan penghargaan dan santunan Sosial	Jumlah Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	
				Terlaksananya pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan,	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
				Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
				Meningkatnya kapasitas pusat Kesejahteraan Sosial (puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
			Meningkatnya pemulihan fungsi sosial kelompok rentan melalui layanan rehabilitasi sosial		Persentase penerima manfaat yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	
				Meningkatnya akses layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai	Penyediaan Permakanan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	
				Terlaksananya pemberdayaan dan pelatihan vokasional bagi kemandirian ekonomi penyandang disabilitas miskin dan rentan, gelandangan dan pengemis	Jumlah penyandang disabilitas miskin dan rentan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pemberdayaan dan pelatihan vokasional untuk kemandirian ekonomi	Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan vokasional bagi kemandirian ekonomi penyandang disabilitas miskin dan rentan, gelandangan dan pengemis	
				Terlaksananya rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
				Terpenuhinya orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui asistensi rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	
				Meningkatnya akses layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	
			Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penerima bantuan sosial melalui pemberdayaan ekonomi dan akses layanan dasar		persentase penerima bantuan sosial yang mendapatkan akses layanan dasar dan bantuan usaha	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Meningkatkan pemutakhiran data fakir miskin secara berkala	Jumlah pengelolaan data fakir miskin	Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	
				Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
				Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
				Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Tertanganinya korban bencana tepat waktu		Persentase kejadian bencana yang tertangani	Progam Penanganan Bencana	
				Terlaksananya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial dan bantuan dasar	Kegiatan Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
				Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	
				Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
				Meningkatnya kesiapsiagaan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana	Jumlah masyarakat yang memiliki pemahaman dan ketrampilan kesiapsiagaan bencana	Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
				Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
				Terpenuhinya kesadaran dan pemahaman anak usia sekolah terhadap risiko bencana	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
			Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan kabupaten/kota		Persentase sarana dan prasarana taman makam	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
				Tersedianya fasilitas yang memadai untuk pengunjung taman makam pahlawan nasional	persentase sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional (TMPN) dalam kondisi baik	Kegiatan Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	
				Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya capaian kinerja aparatur		Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan walidata pendukung statistic sectoral daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan pengumpulan data statistic sectoral daerah	
				Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersusunnya laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				25.219.981.845		25.932.357.655		25.467.101.440		25.501.845.225		25.536.789.010		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				5.429.164.097		5.413.954.254		4.913.954.254		4.913.954.254		4.913.954.254		
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Sosial	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,35	78,55	5.429.164.097	78,65	5.413.954.254	78,75	4.913.954.254	78,85	4.913.954.254	78,95	4.913.954.254	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial	
1.06.012.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				134.695.950		134.695.950		134.695.950		134.695.950		134.695.950		
Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	115	134.695.950	115	134.695.950	115	134.695.950	115	134.695.950	115	134.695.950		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
1.06.012.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17.628.000		17.628.000		17.628.000		17.628.000		17.628.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	17.628.000	2	17.628.000	2	17.628.000	2	17.628.000	2	17.628.000		
1.06.012.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				103.990.000		103.990.000		103.990.000		103.990.000		103.990.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	103.990.000	4	103.990.000	4	103.990.000	4	103.990.000	4	103.990.000		
1.06.012.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				13.077.950		13.077.950		13.077.950		13.077.950		13.077.950		
Tertaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	115	13.077.950	115	13.077.950	115	13.077.950	115	13.077.950	115	13.077.950		
1.06.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.301.561.997		3.301.553.647		3.301.553.647		3.301.553.647		3.301.553.647		
Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.301.561.997	1	3.301.553.647	1	3.301.553.647	1	3.301.553.647	1	3.301.553.647		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2024		2025		2026		2027		2028			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN (Orang-bukan)	16	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.107.294.047		3.107.294.047		3.107.294.047		3.107.294.047		3.107.294.047		
Tersedia nya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN (Orang-bukan)	18	20	3.107.294.047	20	3.107.294.047	20	3.107.294.047	20	3.107.294.047	20	3.107.294.047		
1.06.01.2.02.0000 - Penguasaan dan Pengawasan				181.844.000		181.844.000		181.844.000		181.844.000		181.844.000		
Terkait analisis Penguasaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penguasaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	10	10	181.844.000	10	181.844.000	10	181.844.000	10	181.844.000	10	181.844.000		
1.06.01.2.02.0000 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.235.000		3.235.000		3.235.000		3.235.000		3.235.000		
Tersedia nya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.235.000	1	3.235.000	1	3.235.000	1	3.235.000	1	3.235.000		
1.06.01.2.02.0001 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				9.080.000		9.080.000		9.080.000		9.080.000		9.080.000		
Tersedia nya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	17	17	9.080.000	17	9.080.000	17	9.080.000	17	9.080.000	17	9.080.000		
1.06.01.2.08 - Administrasi Pengendalian Perangkat Daerah				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Tersedia nya laporan pengendalian paket pelayanan dinas beserta atribut kewilayahan	Jumlah Paket Pelayanan Dinas beserta Atribut Kewilayahan (Paket)	18	20	12.000.000	20	12.000.000	20	12.000.000	20	12.000.000	20	12.000.000		
1.06.01.2.08.0000 - Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kewilayahan				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Tersedia nya Pakan Dinas beserta Atribut Kewilayahan	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kewilayahan (Paket)	18	20	12.000.000	20	12.000.000	20	12.000.000	20	12.000.000	20	12.000.000		
1.06.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				232.519.050		232.519.050		232.519.050		232.519.050		232.519.050		
Tersedia nya laporan pengendalian bidang dan jila	Jumlah Paket Komponen Mawake Unifikasi/Perencanaan/ Pengukuran/ Koneksi yang disediakan (Paket)	5	5	232.519.050	5	232.519.050	5	232.519.050	5	232.519.050	5	232.519.050		
	Jumlah Dokumen/ Surat/ Keputusan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Riset Koordinasi dan Koordinasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(00)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Poskader Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Poskader dan Pengkondisian Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Ruang Cetak dan Pengkondisian yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.602.000		5.602.000		5.602.000		5.602.000		5.602.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	5.602.000	5	5.602.000	5	5.602.000	5	5.602.000	5	5.602.000		
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Poskader dan Pengkondisian Kantor				17.395.950		17.395.950		17.395.950		17.395.950		17.395.950		
Tersedianya Poskader dan Pengkondisian Kantor	Jumlah Paket Poskader dan Pengkondisian Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	17.395.950	10	17.395.950	10	17.395.950	10	17.395.950	10	17.395.950		
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Poskader Rumah Tangga				1.950.000		1.950.000		1.950.000		1.950.000		1.950.000		
Tersedianya Poskader Rumah Tangga	Jumlah Paket Poskader Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	5	1.950.000	5	1.950.000	5	1.950.000	5	1.950.000	5	1.950.000		
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				104.894.000		104.894.000		104.894.000		104.894.000		104.894.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	104.894.000	2	104.894.000	2	104.894.000	2	104.894.000	2	104.894.000		
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Ruang Cetak dan Pengkondisian				10.871.200		10.871.200		10.871.200		10.871.200		10.871.200		
Tersedianya Ruang Cetak dan Pengkondisian	Jumlah Paket Ruang Cetak dan Pengkondisian yang Disediakan (Paket)	5	5	10.871.200	5	10.871.200	5	10.871.200	5	10.871.200	5	10.871.200		
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Cetak dan Perawatan Perundutan/Integrasi				5.556.000		5.556.000		5.556.000		5.556.000		5.556.000		
Tersedianya Bahan Cetak dan Perawatan Perundutan/Integrasi	Jumlah Dokumen Bahan Cetak dan Perawatan Perundutan/Integrasi yang Disediakan (Paket)	12	12	5.556.000	12	5.556.000	12	5.556.000	12	5.556.000	12	5.556.000		
1.06.01.2.06.0007 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				86.490.500		86.490.500		86.490.500		86.490.500		86.490.500		
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	12	12	86.490.500	12	86.490.500	12	86.490.500	12	86.490.500	12	86.490.500		
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penyuplai Usaha Perikanan Daerah				641.100.888		638.278.000		138.278.000		138.278.000		138.278.000		
Tersedianya laporan pengadaan barang milik daerah penyuplai usaha perikanan daerah	Jumlah Unit Barak dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	41	12	641.100.888	12	638.278.000	12	138.278.000	12	138.278.000	12	138.278.000		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.07.0008 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				301.490.000		300.000.000		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	391.400.000	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0		
1.06.012.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				249.700.889		139.278.000		139.278.000		139.278.000		139.278.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	41	12	249.700.889	12	139.278.000	12	139.278.000	12	139.278.000	12	139.278.000		
1.06.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah				628.767.000		628.767.000		628.767.000		628.767.000		628.767.000		
Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	628.767.000	12	628.767.000	12	628.767.000	12	628.767.000	12	628.767.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.06.012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				127.800.000		127.800.000		127.800.000		127.800.000		127.800.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	127.800.000	12	127.800.000	12	127.800.000	12	127.800.000	12	127.800.000		
1.06.012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				500.967.000		500.967.000		500.967.000		500.967.000		500.967.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	500.967.000	12	500.967.000	12	500.967.000	12	500.967.000	12	500.967.000		
1.06.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah				478.518.611		465.140.007		465.140.007		465.140.007		465.140.007		
Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertizinannya (Unit)	36	36	478.518.611	36	465.140.007	36	465.140.007	36	465.140.007	36	465.140.007		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	31	31		31		31		31		31			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.06.012.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				41.610.000		41.610.000		41.610.000		41.610.000		41.610.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	41.610.000	1	41.610.000	1	41.610.000	1	41.610.000	1	41.610.000		
1.06.012.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				287.510.367		287.510.367		287.510.367		287.510.367		287.510.367		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	36	36	287.510.367	36	287.510.367	36	287.510.367	36	287.510.367	36	287.510.367		
1.06.012.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				123.218.244		114.409.000		114.409.000		114.409.000		114.409.000		
Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	123.218.244	1	114.409.000	1	114.409.000	1	114.409.000	1	114.409.000		
1.06.012.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26.180.000		21.610.640		21.610.640		21.610.640		21.610.640		
Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	31	31	26.180.000	31	21.610.640	31	21.610.640	31	21.610.640	31	21.610.640		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				1.220.023.750		1.563.266.155		1.567.051.983		1.570.837.810		1.574.623.638		
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam pemberdayaan sosial (%)	100	100	1.220.023.750	100	1.563.266.155	100	1.567.051.983	100	1.570.837.810	100	1.574.623.638	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial	
1.06.022.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				16.247.916		17.247.916		18.247.916		19.247.916		20.247.916		
Meningkatnya partisipasi masyarakat, dunia usaha dan organisasi sosial dalam pengumpulan dana untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	10	16	16.247.916	17	17.247.916	18	18.247.916	19	19.247.916	20	20.247.916		
1.06.022.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				16.247.916		17.247.916		18.247.916		19.247.916		20.247.916		
Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	10	16	16.247.916	17	17.247.916	18	18.247.916	19	19.247.916	20	20.247.916		
tba				0		0		0		0		0		
1.06.022.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				1.203.775.834		1.546.018.239		1.548.804.067		1.551.589.894		1.554.375.722		
Meningkatnya kapasitas sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahawanan, Kepertitisan, Kesetiaan dan Restorasi Sosial (Orang)	0	375	1.203.775.834	375	1.546.018.239	375	1.548.804.067	375	1.551.589.894	375	1.554.375.722		
	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	80	80		80		80		80		80			
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	87	87		87		87		87		87			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	61	70		75		80		85		90			
	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	0	40		41		42		43		44			
	Jumlah Puskesmas desa/kudurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Gradiasi (Lembaga)		306		306		306		306		306			
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	36		37		38		39		40			
	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	230	230		230		230		230		230			
1.06.022.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40.490.000		42.918.345		41.704.173		40.490.000		40.490.000		
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	80	80	40.490.000	80	42.918.345	80	41.704.173	80	40.490.000	80	40.490.000		
1.06.022.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				624.590.134		808.260.884		808.260.884		808.260.884		808.260.884		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	87	87	624.590.134	87	808.260.884	87	808.260.884	87	808.260.884	87	808.260.884		
1.06.022.03.0010 - Fasilitas Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan				238.717.500		238.717.500		238.717.500		238.717.500		238.717.500		
Tetaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	230	230	238.717.500	230	238.717.500	230	238.717.500	230	238.717.500	230	238.717.500		
1.06.022.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kepertintasan, Kesetiajawanan dan Restorasi Sosial				31.796.950		31.796.950		31.796.950		31.796.950		31.796.950		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)	0	375	31.796.950	375	31.796.950	375	31.796.950	375	31.796.950	375	31.796.950		
1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				24.803.400		26.017.572		26.017.572		26.017.572		26.017.572		
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	36	24.803.400	37	26.017.572	38	26.017.572	39	26.017.572	40	26.017.572		
1.06.02.2.03.0013 - Fasilitas Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota				62.244.450		62.244.450		62.244.450		62.244.450		62.244.450		
Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesmas desa/kudurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)		306	62.244.450	306	62.244.450	306	62.244.450	306	62.244.450	306	62.244.450		
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				91.735.600		196.735.600		200.735.600		204.735.600		207.521.428		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	61	70	91.735.600	75	196.735.600	80	200.735.600	85	204.735.600	90	207.521.428		
1.06.02.2.03.0015 - Fasilitas Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi				89.397.800		139.326.938		139.326.938		139.326.938		139.326.938		
Tertaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	0	40	89.397.800	41	139.326.938	42	139.326.938	43	139.326.938	44	139.326.938		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.787.142.900		2.037.312.833		2.068.270.790		2.099.228.748		2.130.386.705		
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penerima manfaat yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial (%)	1,4	1,5	1.787.142.900	1,56	2.037.312.833	1,63	2.068.270.790	1,68	2.099.228.748	1,73	2.130.386.705	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial	
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Partisipatif Sosial				1.539.690.325		1.779.253.220		1.799.604.140		1.819.955.060		1.840.505.980		
Meningkatnya akses layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas tertantar, anak tertantar, lanjut usia tertantar, serta gelandangan pengemis di luar partisipatif sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	130	1.539.690.325	130	1.779.253.220	130	1.799.604.140	130	1.819.955.060	130	1.840.505.980		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pembudayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	92	50		55		60		65		70			
	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	108	100		100		100		100		100			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	42	50		50		50		50		50			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	85	100		100		100		100		100			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Rant Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	70		70		70		70		70			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	416	465		470		475		480		485			
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	75		75		75		75		75			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	125		130		135		140		145			
	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang)	0	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Pemakanan				922.363.025		1.153.850.000		1.166.125.000		1.178.400.000		1.190.875.000		
Terpenuhinya Kebutuhan Pemakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	416	465	922.363.025	470	1.153.850.000	475	1.166.125.000	480	1.178.400.000	485	1.190.875.000		
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				39.648.000		41.233.920		42.819.840		44.405.760		45.991.680		
Tersedianya Pakain dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	125	39.648.000	130	41.233.920	135	42.819.840	140	44.405.760	145	45.991.680		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				64.900.000		71.390.000		77.880.000		84.370.000		90.860.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	92	50	64.900.000	55	71.390.000	60	77.880.000	65	84.370.000	70	90.860.000		
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				136.840.000		136.840.000		136.840.000		136.840.000		136.840.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	85	100	136.840.000	100	136.840.000	100	136.840.000	100	136.840.000	100	136.840.000		
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				139.747.500		139.747.500		139.747.500		139.747.500		139.747.500		
Tertaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	130	139.747.500	130	139.747.500	130	139.747.500	130	139.747.500	130	139.747.500		
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				55.807.300		55.807.300		55.807.300		55.807.300		55.807.300		
Tertaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	75	55.807.300	75	55.807.300	75	55.807.300	75	55.807.300	75	55.807.300		
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				6.750.000		6.750.000		6.750.000		6.750.000		6.750.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	6.750.000	25	6.750.000	25	6.750.000	25	6.750.000	25	6.750.000		
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan				7.850.000		7.850.000		7.850.000		7.850.000		7.850.000		
Tertaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	108	100	7.850.000	100	7.850.000	100	7.850.000	100	7.850.000	100	7.850.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	42	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000		
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		
Tertaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	16.000.000	50	16.000.000	50	16.000.000	50	16.000.000	50	16.000.000		
1.06.04.2.01.0015 - Fasilitas Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Tertaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang)	0	10	60.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000		
1.06.04.2.01.0016 - Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)				18.284.500		18.284.500		18.284.500		18.284.500		18.284.500		
Tertaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	20	18.284.500	20	18.284.500	20	18.284.500	20	18.284.500	20	18.284.500		
1.06.04.2.01.0017 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan				24.500.000		24.500.000		24.500.000		24.500.000		24.500.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	70	24.500.000	70	24.500.000	70	24.500.000	70	24.500.000	70	24.500.000		
1.06.04.2.01.0018 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial				37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		
Tertaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang)	0	10	37.000.000	10	37.000.000	10	37.000.000	10	37.000.000	10	37.000.000		
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				247.452.575		258.059.613		268.666.650		279.273.688		289.880.725		
Meningkatnya akses layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	270	275	247.452.575	280	258.059.613	285	268.666.650	290	279.273.688	295	289.880.725		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50		55		60		65		70			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	70		75		80		85		90			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	70		75		80		85		90			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50		50		50		50		50			
1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang				27.349.000		29.058.313		30.767.625		32.476.938		34.186.250		
Tersedianya Pakaian dan Kdlengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	70	27.349.000	75	29.058.313	80	30.767.625	85	32.476.938	90	34.186.250		
1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti				24.500.000		26.250.000		28.000.000		29.750.000		31.500.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	70	24.500.000	75	26.250.000	80	28.000.000	85	29.750.000	90	31.500.000		
1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				172.978.600		177.978.600		182.978.600		187.978.600		192.978.600		
Tertaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	270	275	172.978.600	280	177.978.600	285	182.978.600	290	187.978.600	295	192.978.600		
1.06.04.2.02.0011 - Pemberian Pdayaran Penelusuran Keluarga				12.624.975		13.772.700		14.920.425		16.068.150		17.215.875		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pdayaran Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	12.624.975	55	13.772.700	60	14.920.425	65	16.068.150	70	17.215.875		
1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pdayaran Reunifikasi Keluarga				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pdayaran Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	10.000.000	50	11.000.000	50	12.000.000	50	13.000.000	50	14.000.000		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				16.196.513.388		16.196.513.388		16.196.513.388		16.196.513.388		16.196.513.388		
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	persentase penerima bantuan sosial yang mendapatkan akses layanan dasar dan bantuan usaha (%)	95,65	95,67	16.196.513.388	95,68	16.196.513.388	95,69	16.196.513.388	95,70	16.196.513.388	95,71	16.196.513.388	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial	
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				16.196.513.388		16.196.513.388		16.196.513.388		16.196.513.388		16.196.513.388		
Meningkatkan pemutakhiran data fakir miskin secara berkala	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.706	1.705	16.196.513.388	2015	16.196.513.388	2.170	16.196.513.388	2.325	16.196.513.388	2.480	16.196.513.388		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	18.317	17.713		17.713		17.713		17.713		17.713			
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	160	140		140		140		140		140			
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	105.544	105.544		105.544		105.544		105.544		105.544			
1.06.052.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				273.966.000		273.966.000		273.966.000		273.966.000		273.966.000		
Teraksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	105.544	105.544	273.966.000	105.544	273.966.000	105.544	273.966.000	105.544	273.966.000	105.544	273.966.000		
1.06.052.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				294.831.550		294.831.550		294.831.550		294.831.550		294.831.550		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	160	140	294.831.550	140	294.831.550	140	294.831.550	140	294.831.550	140	294.831.550		
1.06.052.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				15.605.131.338		15.605.131.338		15.605.131.338		15.605.131.338		15.605.131.338		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	18.317	17.713	15.605.131.338	17.713	15.605.131.338	17.713	15.605.131.338	17.713	15.605.131.338	17.713	15.605.131.338		
1.06.052.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				22.584.500		22.584.500		22.584.500		22.584.500		22.584.500		
Teraksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.706	1.705	22.584.500	2.015	22.584.500	2.170	22.584.500	2.325	22.584.500	2.480	22.584.500		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				520.587.360		605.788.325		605.788.325		605.788.325		605.788.325		
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	100	100	520.587.360	100	605.788.325	100	605.788.325	100	605.788.325	100	605.788.325	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial	
	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapagaannya (%)	10,1	32,7		49		65,4		81,7		100			
	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100	100		100		100		100		100			
1.06.062.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				294.118.235		379.319.200		379.319.200		379.319.200		379.319.200		
Teraksananya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	200	294.118.235	200	379.319.200	200	379.319.200	200	379.319.200	200	379.319.200		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7.850	7.900		7.900		7.900		7.900		7.900			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	200		200		200		200		200			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	200		200		200		200		200			
1.06.062.01.0001 - Penyediaan Makanan				213.084.235		298.285.200		298.285.200		298.285.200		298.285.200		
Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		7.850	7.900	213.084.235	7.900	298.285.200	7.900	298.285.200	7.900	298.285.200	7.900	298.285.200		
1.06.062.01.0002 - Penyediaan Sandang				33.984.000		33.984.000		33.984.000		33.984.000		33.984.000		
Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		200	200	33.984.000	200	33.984.000	200	33.984.000	200	33.984.000	200	33.984.000		
1.06.062.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				14.904.000		14.904.000		14.904.000		14.904.000		14.904.000		
Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		200	200	14.904.000	200	14.904.000	200	14.904.000	200	14.904.000	200	14.904.000		
1.06.062.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial				9.936.000		9.936.000		9.936.000		9.936.000		9.936.000		
Terpenuhi Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		200	200	9.936.000	200	9.936.000	200	9.936.000	200	9.936.000	200	9.936.000		
1.06.062.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				22.210.000		22.210.000		22.210.000		22.210.000		22.210.000		
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		1	1	22.210.000	1	22.210.000	1	22.210.000	1	22.210.000	1	22.210.000		
1.06.062.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				226.469.125		226.469.125		226.469.125		226.469.125		226.469.125		
Meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40	40	226.469.125	40	226.469.125	40	226.469.125	40	226.469.125	40	226.469.125		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	31	50		50		50		50		44			
	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang)	0	375		375		375		375		375			
1.06.062.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				36.346.625		36.346.625		36.346.625		36.346.625		36.346.625		
Tertaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	31	50	36.346.625	50	36.346.625	50	36.346.625	50	36.346.625	44	36.346.625		
1.06.062.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				143.960.000		143.960.000		143.960.000		143.960.000		143.960.000		
Terperuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40	40	143.960.000	40	143.960.000	40	143.960.000	40	143.960.000	40	143.960.000		
1.06.062.02.0008 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah				46.162.500		46.162.500		46.162.500		46.162.500		46.162.500		
Tertaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang)	0	375	46.162.500	375	46.162.500	375	46.162.500	375	46.162.500	375	46.162.500		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				66.550.350		115.522.700		115.522.700		115.522.700		115.522.700		
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang terkelola dengan baik (%)	95	95	66.550.350	95	115.522.700	95	115.522.700	95	115.522.700	95	115.522.700	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				66.550.350		115.522.700		115.522.700		115.522.700		115.522.700		
Tersedianya fasilitas yang memadai untuk pengunjung taman makam pahlawan nasional	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1	1	66.550.350	1	115.522.700	1	115.522.700	1	115.522.700	1	115.522.700		
	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				48.967.850		99.663.700		99.663.700		99.663.700		99.663.700		
Tertaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	48.967.850	1	99.663.700	1	99.663.700	1	99.663.700	1	99.663.700		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				17.582.500		15.859.000		15.859.000		15.859.000		15.859.000		
Tertaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1	1	17.582.500	1	15.859.000	1	15.859.000	1	15.859.000	1	15.859.000		

4.2 Subkegiatan Pendukung Program Prioritas Pembangunan daerah

Pemerintah Kabupaten Jombang 8 (delapan) program prioritas Pembangunan sebagai arah strategis untuk mendorong transformasi daerah menuju kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Program prioritas Pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun desa dan kota untuk semua
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing
- 3) Mengentaskan pengangguran
- 4) Membangun infrastruktur berkelanjutan dan memperkuat ekonomi
- 5) Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan
- 6) Memperkuat ketahanan pangan
- 7) Memperkuat harmoni sosial
- 8) Menghadirkan tata Kelola pemerintahan yang bersih

Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam mengampu **program prioritas kelima**, yaitu **mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan**. Program ini diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan sosial yang menyasar kelompok rentan dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Dinas Sosial melakukan intervensi melalui Perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta fasilitasi rehabilitasi sosial. Upaya ini juga dilengkapi dengan peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial dan kolaborasi lintas sektor, agar pelayanan menjadi tepat sasaran, inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	Program pemberdayaan sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten-Kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
			Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	
			Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
			Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	
			Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
2	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Alat Bantu	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Pemberian Layanan Rujukan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
			Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
			Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	
			Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Pemberian Layanan Rujukan	
3	Program Perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

4.2.1 Program Pendukung Pengarusutamaan Gender

Program pengarusutamaan gender (PUG) memiliki peran penting dalam dokumen renstra Dinas Sosial karena merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan sosial. Dalam konteks penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial, PUG menjadi pendekatan strategis untuk memastikan bahwa Perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dari setiap kebijakan dan program sosial. Melalui integrasi perspektif gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program, Dinas Sosial dapat merancang layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan

spesifik kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau atau terpinggirkan. Selain itu pelaksanaan PUG juga mendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi yang mendorong tata Kelola pemerintahan yang partisipatif dan berbasis data. Oleh karena itu penting bagi Dinas Sosial menjadikan PUG sebagai bagian integral dalam renstra agar kebijakan dan program sosial tidak bersifat umum, tetapi juga adil dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

4.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mendasar pada Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, pada pasal 1 angka 2 bahwa Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan utama organisasi dalam mewujudkan hasil (outcome) strategi sesuai dengan tugas, fungsi dan mandatnya.

IKU menjadi tolok ukur utama dalam menilai kontribusi instansi pemerintah terhadap pencapaian sasaran strategis pembangunan nasional maupun daerah

IKU RPJMD tahun 2025-2029 yang diampu oleh Dinas Sosial adalah:

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	indeks	65,39	65,40	65,41	65,42	65,43	65,44	

Adapun Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Sosial untuk mencapai tujuan dan sasaran PD, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks pemenuhan kebutuhan dasar	Indek	60,82	60,83	60,84	60,85	60,86	60,87	
2	Indeks peranan sosial	Indeks	76,31	76,32	76,33	76,34	76,35	76,36	
3	Persentase capaian SPM bidang sosial	persen	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Indeks	75,65	75,70	75,75	75,80	75,85	75,90	

4.3.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci (IKK) adalah indicator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan daerah. Indikator kinerja kunci (IKK) digunakan untuk memantau dan mengendalikan kegiatan operasional, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja, Adapun IKK pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen	100	100	100	100	100	100	
4	persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase sarana dan prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase sarana dan prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase kejadian bencana yang tertangani	persen	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang	persen	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti								
11	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam pemberdayaan sosial	persen	36,00	37,40	38,00	40,20	41,40	43,00	
12	Persentase penerima bantuan sosial yang mendapatkan akses layanan dasar dan bantuan usaha	persen	95,67	95,67	95,67	95,67	95,67	95,67	
13	Jumlah pengelolaan data fakir miskin	orang	1550	1705	2015	2170	2325	2480	

BAB V PENUTUP

Bagian penutup rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 berisi kesimpulan, kaidah pelaksanaan, pedoman transisi, dan pengendalian evaluasi. Berbagai ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan dokumen rencana strategis (renstra) dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat.

5.1 Kesimpulan

Pembangunan bidang sosial Kabupaten Jombang periode 2025-2029 diarahkan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif. Penanganan PPKS menjadi focus utama, dengan strategi mulai dari penguatan fondasi data sosial hingga konsolidasi layanan sosial berkelanjutan. Setiap tahap menggambarkan pendekatan yang sistematis, hal ini selaras dengan tujuan RPJMD, NSPK dan sasaran renstra, yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial”

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menyajikan berbagai hal penting terkait pelaksanaan renstra dan menciptakan koodinasi antar pelaku pembangunan, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan program.

5.3 Pedoman Transisi

Pedoman transisi merupakan acuan yang dilaksanakan di akhir periode renstra bertujuan untuk memastikan kesinambungan, konsistensi, dan ketepatan arah dalam proses perencanaan pembangunan Dinas Sosial dari periode yang sedang berjalan ke periode berikutnya. Tujuan utamanya adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keberlanjutan pembangunan

Pedoman transisi memastikan bahwa program, kegiatan, dan sasaran strategis yang belum tercapai dalam renstra periode sebelumnya dapat dianalisi, dan bila masih relevan, diselaraskan kembali ke dalam renstra

periode berikutnya. Hal ini untuk mencegah terputusnya pelaksanaan agenda pembangunan jangka menengah

2. Menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan daerah

Pedoman ini membantu memastikan penyusunan renstra periode berikutnya tetap sinkron dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD (baru), RKP, dan arah kebijakan nasional dalam RPJM maupun kebijakan sektoral seperti NSPK dan SPM

3. Mengarahkan penilaian kinerja dan refleksi capaian

Pedoman transisi memberikan kerangka bagi evaluasi menyeluruh atas capaian kinerja renstra sebelumnya, termasuk identifikasi keberhasilan, tantangan dan rekomendasi strategis untuk perbaikan. Hal ini menjadi input penting dalam perumusan tujuan dan sasaran yang lebih realistis dan berdampak

4. Menjaga konsistensi format dan prosedur perencanaan

Dengan adanya pedoman transisi, penyusunan renstra dapat dilakukan secara sistematis, dengan format dan prosedur yang konsisten, memudahkan akuntabilitas, pelaporan dan pengawasan internal serta eksternal

5. Mendorong adaptasi terhadap perubahan dinamika strategis

Periode transisi adalah momentum untuk mengantisipasi perubahan konteks global, nasional, dan local (misal akibat pandemi, perubahan regulasi, atau dinamika sosial ekonomi) pedoman ini membantu Dinas Sosial menyesuaikan Kembali focus dan prioritas strategis dalam renstra baru.

6. Mengarahkan penguatan sistem tata Kelola

Pedoman transisi menjadi alat untuk mengintegrasikan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) terutama dalam aspek manajemen kinerja berbasis hasil (sakip)

5.4 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan yang diperlukan untuk memastikan bahwa target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Pengendalian dan evaluasi terdiri atas 3 (tiga) tahap, yakni tahap perumusan kebijakan rencana Pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan dan evaluasi hasil rencana pembangunan.

Pengendalian dilakukan dengan penyusunan indicator kinerja yang jelas untuk setiap program, diikuti dengan pemantauan terhadap eplaksanaan program untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai jadwal, anggaran dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Sementara evaluasi bertujuan untuk menilai sejauhmana hasil pembangunan telah mencapai tujuan yang diinginkan.

Jombang, 19 September 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JOMBANG



AGUNG HARIADI, S.T, MM
NIP 19701126 200212 1 006